

Eks Bendahara DPRD Mamuju Ikut Tersangka Korupsi Anggaran Makan Minum Fiktif Tahun 2023

Tayang: Sabtu, 23 Mei 2026 17:13 WITA

Editor: [Nurhadi Hasbi](#)



Gedung baru DPRD Mamuju diabadikan dari arah Jl Yod Sudarso Kelurahan Binanga. Tampak gedung ini berdiri mewah, Kamis (11/7/2024).

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Selain eks Ketua [DPRD Mamuju](#), Azwar Anshari, eks bendahara, Sofyan ikut menjadi tersangka kasus korupsi anggaran makan minum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2023.

Sofyan saat ini menjabat sebagai Kepala Pasar di Kabupaten Mamuju.

Kasus ini merugikan negara Rp 795 juta.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulbar Kombes Pol Abdul Azis mengonfirmasi angka tersebut didapatkan dari hasil rangkaian penyelidikan mendalam.

Ia mengatakan, penyidik sebenarnya telah menjadwalkan pemeriksaan kedua tersangka Kamis 21 Mei 2026.

Namun, keduanya kompak mangkir dari jadwal pemeriksaan.

Keduanya tidak memberikan alasan atau penjelasan atas ketidakhadiran di depan penyidik.

Kombes Pol Abdul Azis menegaskan, penyidik tidak akan berhenti dan segera menyusun langkah hukum selanjutnya.

Pihaknya segera jadwalkan ulang pemanggilan kedua dalam waktu dekat untuk memeriksa para tersangka terkait aliran dana Rp 795 juta tersebut.

"Nanti kami rilis," pungkasnya.

Bergulir Sejak Akhir 2025

Kasus dugaan korupsi anggaran makan minum pada lingkup Sekretariat [DPRD Mamuju](#) bergulir sejak akhir 2025.

Azis menegaskan kegiatan pengadaan makan dan minum itu bersifat fiktif.

Pegawai DPRD juga mengaku kegiatan tersebut memang tidak nyata.

Saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Inspektorat Mamuju.

Gelar perkara untuk penetapan tersangka dijadwalkan awal tahun depan.

Azis menuturkan, penetapan tersangka akan dilakukan setelah hasil audit kerugian negara keluar.

Selain itu, Azis menjelaskan penanganan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Sulbar.

Kasus perjalanan dinas fiktif tersebut dihentikan karena seluruh kerugian negara sudah dikembalikan.



Eks Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Azwar Anshari Habsi. (Tribun Sulbar / Hablu Hambali)

Inspektorat Hitung Kerugian Negara

Inspektorat Kabupaten Mamuju mengonfirmasi sedang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas permintaan pihak kepolisian.

Inspektur Inspektorat Mamuju, Muhammad Yani, mengatakan pihaknya telah menerima permintaan resmi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda [Sulawesi Barat](#) (Sulbar) terkait kasus belanja makan dan minum di DPRD Kabupaten Mamuju.

"Saat ini Inspektorat sedang menindaklanjuti permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan dan standar pengawasan yang berlaku," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (1/1/2026)

Indikasi Kegiatan Fiktif dan Dokumen Palsu

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, penyidik menemukan indikasi kuat bahwa pengadaan makan dan minum tersebut bersifat fiktif.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulbar, [Kombes Pol Abdul Azis](#), mengungkapkan sejumlah dokumen penting telah disita, termasuk kuitansi yang diduga dimanipulasi untuk mencairkan anggaran.

"Kami sudah menandatangani penyitaan seluruh dokumen. Dokumen-dokumen ini yang dipalsukan, termasuk kuitansi-kuitansi dari pihak penyedia," ujar Abdul Azis di Mapolda Sulbar, Rabu (14/1/2026).

Azis menjelaskan, modus yang digunakan adalah dengan membuat laporan kegiatan seolah-olah terjadi, padahal pada kenyataannya tidak ada.

"Korupsi itu kami lihat dari dokumen. Mana dokumen yang dibuat, benar tidak sesuai faktanya. Ternyata kegiatannya tidak ada, namun dokumennya dibuat seolah-olah ada. Mereka yang merencanakan, membuat, hingga melaksanakan sendiri," jelas Azis. (*)

Sumber: [Tribun sulbar](#)